

PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN PDRB TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN PROVINSI JAWA TIMUR

Alvira Lokahita Sirait

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: alvira.19024@mhs.unesa.ac.id

Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: ladifisabilillah@unesa.ac.id

Abstrak

Dalam tatanan kenegaraan, kemiskinan merupakan sebuah permasalahan klasik yang telah ada sejak dahulu. Terkait faktor yang mendasari kemiskinan sendiri sangat kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pengaruh yang diberikan oleh tingkat pengangguran terbuka dan PDRB terhadap jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2017-2021. Sementara itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis data regresi panel. Hasil yang didapatkan adalah variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dan variabel PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin

Kata Kunci : Kemiskinan, PDRB, Pengangguran, Data Panel,

Abstract

In the state order, poverty is a classic problem that has existed for a long time. The factors underlying poverty itself are very complex. This study aims to find out the impact of unemployment rate and GDP to the number of poor population in the Province of East Java period 2017-2021. Meanwhile the method of this study is a quantitative method with panel regression data as the analysis techniques. The results obtained that unemployment rate variable has a significant positive effect on the number of poor people and the GDP variable has a significant negative effect on the number of poor population

Keywords: Poverty, GDP, Unemployment, Panel Data.

PENDAHULUAN

Dalam rentang waktu yang cukup lama, kemiskinan memang telah menjadi permasalahan klasik yang serius bagi beberapa Negara, termasuk Indonesia. Kemiskinan bagaikan fenomena yang akan terus menjadi momok bagi tatanan suatu Negara baik bagi Negara maju maupun Negara yang masih berkembang, walaupun

How to Cite: Sirait, A.L.& Fisabilillah, Ladi W.P. (2022). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur. *Independent : Journal Of Economics*, 2(3), 124-134

masalah kemiskinan ini lebih terasa dampaknya pada Negara yang masih berkembang. Melansir dari Badan Pusat Statistik (2016), kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam sisi perekonomian, sisi materi, dan fisik demi mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur oleh pengeluaran (Basic Need Approach) . Pada bulan Maret 2022, BPS telah menetapkan bahwa garis kemiskinan tercatat sebesar Rp 505.469 per kapita per bulan. Dimana garis kemiskinan ini terdiri dari kebutuhan makanan sebesar Rp 374.455 dan kebutuhan bukan makanan sebesar Rp 131.014. Jadi berdasarkan garis kemiskinan tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk yang memiliki penghasilan atau memiliki pengeluaran di atas Rp 505.469 per bulan tidak dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Selama ini, pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya telah berusaha semaksimal mungkin dalam menekan angka kemiskinan yang ada. Akan tetapi, sebelum menindaklanjuti hal-hal terkait kemiskinan ataupun merancang strategi untuk menanggulangnya, akan lebih baik jika dilakukan pengamatan terlebih dahulu terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan itu sendiri sehingga keputusan, rencana, dan kebijakan yang tepat, tertata, dan terencana dapat diambil serta diterapkan. Menurut pendapat para ahli, kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor yang mendasarinya adalah kesenjangan antara penduduk kaya dan penduduk miskin yang semakin melebar (Tisniwati, 2012). Kesenjangan ini diakibatkan oleh ketidakseimbangan yang terjadi antar daerah sehingga menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata . Sementara itu, Ragnar Nurkse dalam Handayani (2018) mengemukakan model lingkaran setan kemiskinan atau yang biasa disebut sebagai “*vicious cycle of poverty*”, yang ia kembangkan, memaparkan bahwa kemiskinan disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar yang menyebabkan rendahnya produktivitas, lalu kemudian menyebabkan rendahnya pendapatan, dan hal ini akan ber implikasi pada rendahnya tingkat investasi dan tabungan, sehingga modal pun berkurang, dan kembali lagi pada tingkat produktivitas yang rendah, begitupun seterusnya. Jadi dapat disimpulkan pendapat Nurkse ini bahwa faktor penyebab kemiskinan ini membentuk suatu lingkaran setan yang harus diputus salah satu mata rantainya agar siklus ini dapat berhenti. Namun untuk melakukan hal tersebut juga tidak mudah mengingat kemiskinan merupakan masalah yang kompleks. Menurut Kuncoro dalam (Wirawan & Arka, 2015), secara spesifik keterbatasan modal, tingginya tingkat pengangguran, laju pertumbuhan ekonomi adalah komponen utama penyusun lingkaran setan kemiskinan dimana dibalik itu semua masih ada faktor yang melatarbelakangi seperti tingkat pendidikan, sumber daya alam yang terbatas, dan lain-lain.

Di Jawa Timur persentase angka kemiskinan yang ada di provinsi tersebut selalu mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Akan tetapi pada rentang tahun 2020- 2021 terjadi peningkatan persentase angka kemiskinan. Hal ini tidak mengherankan mengingat pada tahun tersebut sedang terjadi pandemi covid-19 sehingga menyebabkan kelumpuhan perekonomian. Walaupun tingkat kemiskinan cenderung mengalami penurunan, akan tetapi persentase kemiskinan di

Provinsi Jawa Timur masih belum mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah. BPS mencatat bahwa pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Jawa Timur mencapai 11,40 persen dan pada maret 2022 turun menjadi 10,38 persen dengan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur masih sebanyak 4,18 juta jiwa dimana sebanyak 1 juta jiwa tergolong ke dalam kategori miskin ekstrem. Hal ini membuat Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia, yang kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 4.05 juta jiwa, dan Jawa Tengah pada posisi ketiga dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 3.8 juta jiwa. Namun hal ini termasuk hal yang wajar mengingat Jawa Timur juga merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk yang terbanyak pula, apalagi hal ini diikuti dengan prestasi pemerintah provinsi dalam mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 391.4 ribu jiwa. Capaian ini masih dianggap kurang oleh pemerintah provinsi yang menargetkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur dapat turun menjadi satu digit saja yaitu dalam angka 9 persen kebawah. Sementara itu angka pengangguran terus memiliki pola yang sama dengan jumlah penduduk miskin, yaitu menurun setiap tahunnya dan naik pada tahun saat pandemi terjadi. Pola kebalikannya terjadi pada nilai PDRB Provinsi dimana nilai PDRB mengalami kenaikan setiap tahunnya dan turun pada tahun 2020. Setahun setelah pandemi terjadi, perekonomian di Provinsi Jawa Timur mulai pulih ditandai oleh tingkat pengangguran yang mulai menurun kembali, peningkatan nilai PDRB, dan tingkat kemiskinan. Akan tetapi, jumlah penduduk miskin di Provinsi ini masih banyak jumlahnya, sehingga Jawa Timur dinobatkan sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian berjudul “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengolah data yang didapatkan sesuai dengan prosedur statistik, oleh karena itu penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapatkan dari situs web resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dimana data yang diambil adalah data tingkat pengangguran terbuka, PDRB, dan jumlah penduduk miskin pada 38 Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2017 sampai 2021 sehingga jenis data pada penelitian ini adalah data panel. Terkait populasi pada penelitian ini meliputi seluruh data tingkat pengangguran terbuka, PDRB, dan jumlah penduduk miskin Jawa Timur selama 15 tahun, yaitu sejak tahun 2006-2015, namun diberi batasan pada populasi tersebut dengan mengambil beberapa sampel saja yaitu dari tahun 2017-2021. Selain itu, dalam upaya pengumpulan data, peneliti melakukan studi pustaka dan studi dokumen melalui berbagai sumber literatur, dokumen, dan jurnal-jurnal penelitian yang ada sehingga terciptalah hasil bentuk yang padu, terurut, dan saling memiliki keterkaitan.

Kemudian teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi data panel dengan alat analisis berupa stata dimana 38 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur adalah data *cross section* nya dan tahun 2017 sampai 2021 sebagai data *time series* nya. Sebelum melakukan regresi, maka perlu melakukan uji penentuan model terbaik apakah *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, atau *Random Effect Model* yaitu melalui Uji Chow, Uji Haussman, dan Uji Lagrange Multiplier. Setelah itu baru dapat melakukan regresi dan menganalisis hipotesis Uji F, Uji T, dan Uji R-Square. Berikut merupakan perumusan persamaan model pada regresi data panel :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Keterangan :

- Y : Variabel Dependen atau Terikat (Jumlah penduduk miskin)
X : Variabel Independen atau Bebas (tingkat pengangguran terbuka dan PDRB)
i : Individu ke- i
t : Periode ke- t
 α : Konstanta
 β : Koefisien Regresi Variabel Independen
 ε : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Estimasi

Tabel 1.1. Hasil Uji Persyaratan Analisis

Tahapan Uji	Pengambilan Keputusan	Hasil Uji	Keterangan
Uji Chow	H0 = Pilih CEM H1 = Pilih FEM	0.000 < 0.05 (H0 Ditolak)	<u>Pilih FEM</u>
Uji Haussman	H0 = Pillih REM H1= Pilih FEM	0.874 > 0.05 (H0 <u>Diterima</u>)	<u>Pilih REM</u>
Uji LM	H0 = Pilih CEM H1 = Pilih REM	0.000 < 0.05 (H0 <u>Ditolak</u>)	<u>Pilih REM</u>

Sumber : Hasil Pengolahan Data pada Stata, 2022

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan dalam penentuan model terbaik, maka dapat diketahui bahwa model yang terbaik adalah *Random Effect Model* (REM)

dikarenakan model tersebut telah terpilih pada uji Haussman dan Uji Lagrange Multiplier. Tahap selanjutnya dalam pengolahan data adalah uji asumsi klasik, namun dikarenakan model yang terpilih adalah REM, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Hal ini dapat terjadi karena model ini diasumsikan menggunakan metode estimasi Generalized Least Square (GLS) dimana estimator digunakan untuk memperhitungkan serta mengatasi masalah heterokedastisitas dan autokorelasi (Melati & Suryowati, 2018). Maka tahap selanjutnya adalah menganalisis hasil regresi data panel pada *Random Effect Model*.

Tabel 1.2. Hasil Regresi Data Panel pada Random Effect Model

y	Coef.	St.Err	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]
tpt	.067	.013	5.28	0	.042	.091
pdrb	-.645	.079	-8.14	0	-.8	-.489
Cons	10.951	.832	13.16	0	9.321	12.581
Mean dependent var			4.409	SD dependent var		1.023
Overall r-squared			0.111	Number of obs		190
Chi-square			94.501	Prob > chi2		0.000
R-squared within			0.374	R-squared between		0.110

Sumber : Hasil Pengolahan Data pada Stata, 2022

Berdasarkan tabel hasil regresi data panel pada model Random Effect di atas, didapatkan hasil model matematis sebagai berikut :

$$Y_{it} = 10.951 + 0.67(X1) - 0.645 (X2) + \varepsilon_{it}$$

Model matematis di atas memiliki arti yaitu bahwasanya nilai konstanta adalah sebesar 10.951. Hal ini memiliki arti bahwa ketika variabel pengangguran dan pdrb tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, maka variabel lain akan mempengaruhi kemiskinan sebesar 10.951 dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian koefisien regresi tingkat pengangguran terbuka menunjukkan angka 0.67, yang berarti setiap peningkatan pengangguran sebesar 1 maka, akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebanyak 0.067 dengan asumsi variabel independen nilainya tetap. Lalu nilai koefisien regresi PDRB adalah 0.645 yang dapat disimpulkan bahwa setiap peningkatan pdrb sebanyak 1 maka, akan mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 0,645 dengan asumsi variabel yang lain adalah tetap.

Uji T

Pada uji-T akan diukur hubungan parsial antara variabel independen yaitu variabel tingkat pengangguran terbuka dan PDRB terhadap variabel dependen yaitu

variabel jumlah penduduk miskin. Interpretasi analisis uji-t mengacu pada output *p-value* untuk mengetahui pengaruh signifikansi variabel X terhadap Y dan nilai koefisien untuk mengetahui arah hubungan antara variabel X dan variabel Y. Pada tabel 1.2. nilai *p-value* variabel X1 yaitu tingkat pengangguran terbuka sebesar $0,000 < 0,05$ (*alpha*) dan koefisiennya positif, maka hal tersebut memiliki arti bahwa variabel X1 yaitu tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Sedangkan untuk variabel X2 yaitu PDRB nilai *p-value* nya sebesar $0,000 < 0,05$ (*alpha*) namun nilai koefisiennya negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB berpengaruh signifikan dan negatif terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Timur.

Uji F

Uji F statistik bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan semua variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun pengambilan keputusan untuk Uji F ini adalah apabila output probabilitas $< \alpha$, maka variabel X1 dan X2 berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Pada tabel hasil regresi. dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas adalah sebesar $0.000 < 0.05$ (*alpha*), maka tingkat pengangguran terbuka dan PDRB berpengaruh secara simultan terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Timur

R-Squared

Uji R-square atau koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui besaran dari pengaruh variabel independen terhadap dependen. Pada tabel 1.2. nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0.11 atau sebesar 11.1 persen dimana sisanya sebanyak 88.9 persen dijelaskan di luar variabel pada penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan hasil regresi, tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Hal gini memiliki maksud bahwa apabila tingkat pengangguran tinggi, maka akan meningkatkan pula jumlah penduduk miskin, berlaku juga untuk hal sebaliknya. Pekerjaan merupakan hal yang sangat krusial bagi setiap individu, mengingat bahwa hasil dari pekerjaan tersebut yaitu pendapatan, akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, pengangguran akan menyebabkan seseorang menjadi tidak produktif dan berujung pada kebutuhan-kebutuhan dalam hidup yang tidak dapat terpenuhi. Faktor penyebab tingkat pengangguran yang tinggi selain disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan dan tingginya jumlah penduduk, juga disebabkan oleh faktor individu yang kurang memiliki daya saing kemudian diperparah dengan laju perkembangan teknologi

yang semakin pesat sehingga sedikit demi sedikit tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin H. R. Handayani & Priastiwi (2019)

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Ragnar Nurkse dalam teori lingkaran setan kemiskinan yang menyatakan bahwa rendahnya produktivitas akan menuju pada rendahnya pendapatan yang bermuara pada ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Muslim (2014) pengangguran memang merupakan hal yang rumit dengan faktor penyebab yang tak kalah rumitnya meliputi faktor eksternal dan internal, baik yang dapat diprediksi maupun yang tidak dapat diprediksi. Penyelesaian dari masalah ini sudah sepatutnya melibatkan kerja sama dari berbagai pihak. Adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran ini di antaranya pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan perumus peraturan, pihak masyarakat sendiri sebagai objek yang disejahterakan sekaligus subjek pelaksana kebijakan, serta pihak badan usaha atau pemberi kerja sebagai mediator yang menjembatani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui upah yang diberikan. Terkait penanggulangan pengangguran tersebut, dari pemerintah telah menyiapkan beberapa solusi untuk menanggulangi nya yaitu dengan menyelenggarakan bursa pasar kerja, menggalakkan kegiatan ekonomi informal, mendirikan pusat pelatihan kerja, hingga meningkatkan mutu pendidikan. Dari pihak masyarakat sendiri dapat memanfaatkan fasilitas dari pemerintah tersebut dengan sebaik-baiknya dan sebijak mungkin agar seiring dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran dapat ditekan. Sementara itu solusi penanggulangan pengangguran yang dapat dilakukan oleh badan usaha atau pihak pemberi kerja adalah dengan melaksanakan aturan kebijakan dari pemerintah sebaik mungkin, mengklasifikasikan setiap jabatan sesuai dengan deskripsi pekerjaannya sehingga tidak ada tenaga kerja yang multitasking atau *over duties*, menerapkan suasana lingkungan pekerjaan yang sehat dan sportif, melaksanakan pelatihan internal sesuai dengan budaya perusahaan atau industri yang bersangkutan, dan lain sebagainya. Apabila setiap pihak dapat melakukan kewajiban dan tugasnya dengan baik maka tak ayal lagi tingkat pengangguran terbuka dapat diminimalisir dan tenaga kerja yang ada dapat terserap dengan baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setya Ningrum (2017), Bintang & Woyanti (2018), serta Alhudhori (2017) yang menyatakan bahwa Tingkat Pengangguran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin atau kemiskinan

Pengaruh PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan hasil analisis regresi PDRB berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Hal ini memiliki maksud yaitu bahwa peningkatan PDRB akan menurunkan jumlah penduduk miskin, berlaku pula pada hal sebaliknya. Pembangunan suatu wilayah diindikasikan oleh pertumbuhan ekonomi nya. Agar perekonomian dapat terus tumbuh maka keberlangsungan aktivitas ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi harus terus berjalan. Indikator pertumbuhan ekonomi salah satunya dapat dilihat dari output produk domestik bruto (PDB) untuk tingkat nasional atau produk domestik regional bruto

(PDRB) di tingkat daerah. Output dari PDRB berasal dari nilai tambah seluruh sektor perekonomian yang ada di daerah tersebut. Sektor perekonomian atau dapat juga disebut sebagai “unit ekonomi” dikelompokkan lagi ke dalam sub sektor yang pengklasifikasiannya mengacu pada kebijakan konsepsi sektoral ekonomi yang berlaku di masing-masing daerah atau dapat juga dalam skala internasional. Klasifikasi unit ekonomi tersebut terkadang dapat digolongkan ke dalam 3 sektor, 9 sektor, atau 17 sektor. Pada awalnya negara Indonesia memberlakukan 9 sektor lapangan usaha dalam menyajikan nilai PDRB namun seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan penggunaan tahun dasar baru dimana yang pada awalnya menggunakan tahun 2000, menjadi tahun 2010 sebagai tahun dasar. Hal ini mengakibatkan negara Indonesia memberlakukan penyajian PDRB dengan 17 sektor ekonomi atau lapangan usaha (Prasetyani & Sumardi, 2020).

Di Jawa Timur sendiri nilai PDRB nya cukup tinggi, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Saat ini nilai PDRB Jawa Timur terbesar kedua setelah provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 694.54 triliun pada kuartal I tahun 2022. Terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota, lapangan usaha yang mendominasi perekonomian di Jawa Timur adalah industri pengolahan yaitu sebesar 30.31 persen. Namun dari aspek PDRB perkapita, Provinsi Jawa Timur memiliki nilai PDRB perkapita yang terbilang cukup rendah dan berada di bawah rata-rata PDB Perkapita nasional. Faktor yang melatarbelakangi fenomena ini diantaranya karena pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur sempat terkonstraksi akibat pandemi covid 19 dan di sisi lain peningkatan jumlah penduduk. Oleh karena itu kondisi tersebut sepatutnya dioptimalkan sebaik mungkin hingga mencapai sumber daya yang produktif. Demi mencapai upaya pengurangan jumlah penduduk miskin, dari pihak pemerintah dapat mengoptimalkan setiap sektor ekonomi atau lapangan usaha yang ada. Sumber daya yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur sangat banyak mengingat provinsi ini terbentuk dari 29 kabupaten dan 9 kota, oleh karena itu penting untuk tidak berfokus pada beberapa sektor saja. Struktur perekonomian yang berjalan di Jawa Timur didominasi oleh sektor sekunder, namun apabila dioptimalkan dan diberi perhatian lebih lanjut, Jawa Timur dapat merambah setiap sektor perekonomian seperti sektor primer dan sektor tersier. Terkait sektor primer contohnya, beberapa kabupaten yang ada di Jawa Timur ada yang bergerak di bidang pertanian, perikanan dan perkebunan, sumber daya yang ada dapat dialokasikan untuk mengolah potensi tersebut. Kemudian pada sektor tersier, pariwisata yang ditawarkan beberapa kabupaten dan kota yang ada juga tidak kalah banyaknya, tinggal bagaimana strategi pengelolaannya saja untuk mendatangkan wisatawan, apalagi sektor pariwisata pada era ini cukup menggiurkan dan pastinya membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengelolanya, sesuai dengan teori pertumbuhan Robert yang menyatakan agar pertumbuhan penduduk dimanfaatkan untuk mencapai produktivitas. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wirawan & Arka (2015) dan Permana & Arianti (2012) yang mendapatkan hasil bahwa PDRB berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin atau kemiskinan.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB Perkapita terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan hasil Uji F pada regresi linear berganda, variabel tingkat pengangguran terbuka dan PDRB Perkapita berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel Y, yaitu jumlah penduduk miskin. Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan penanganan yang tepat bagi tingkat pengangguran terbuka dan pengoptimalan PDRB Perkapita, maka jumlah penduduk miskin dapat berkurang, berlaku sama pada hal sebaliknya. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan pada bab sebelumnya. Apabila tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan hal itu memiliki arti bahwa penduduk usia kerja atau produktif telah terserap dengan baik ke dalam pasar kerja, penduduk yang memiliki pekerjaan tersebut berperan sebagai pelaku aktivitas produksi yang menggerakkan roda perekonomian. Apabila aktivitas perekonomian ini berjalan dengan baik dan seimbang maka akan berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya nilai PDRB. Namun tingginya nilai PDRB tidak serta merta menjadi indikator yang akan mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada. Perlu diketahui bahwa kemakmuran suatu wilayah dilihat dari kesejahteraan penduduknya. Oleh karena itu untuk mengukur kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari nilai PDRB Perkapita yang merupakan hasil bagi dari PDRB dan jumlah penduduk. Oleh karena itu perlu penanganan yang tepat demi mengoptimalkan tenaga kerja yang ada ke dalam setiap sektor perekonomian sehingga nilai PDRB perkapita yang besar dapat dicapai dan pendistribusian output maupun input dalam aktivitas perekonomian yang ada dapat berjalan dengan lancar, seimbang, dan merata.

Sementara itu kemampuan variabel tingkat pengangguran terbuka dan PDRB Perkapita hanya mampu menjelaskan variabel jumlah penduduk miskin sebesar 11 persen saja. Hal ini dikarenakan fenomena kemiskinan merupakan sebuah konsep yang rumit dan kompleks. Seperti yang dinyatakan oleh Teori Lingkaran Setan Kemiskinan Ragnar Nurkse, bahwa kemiskinan adalah sebuah siklus yang membentuk konstelasi tak terputus. Faktor yang mendasarinya pun sangat beragam dan meliputi berbagai aspek. Itulah hal yang melatarbelakangi mengapa kemampuan variabel X dalam menjelaskan variabel Y begitu kecil.

KESIMPULAN

Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, PDRB berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Kemudian secara simultan kedua variabel X yaitu tingkat pengangguran terbuka dan PDRB memiliki pengaruh terhadap variabel Y, jumlah penduduk miskin. Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan tersebut, penulis ingin memberikan beberapa saran kepada beberapa pihak. Terkait penanggulangan pengangguran, pemerintah dapat memperbanyak pelatihan-pelatihan informal yang dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sehingga dapat menciptakan individu-individu siap terjun ke dalam dunia kerja. Kemudian, pemerintah juga

diharapkan dapat mulai memberikan perhatian kepada sektor pariwisata dikarenakan sektor ini cukup menjanjikan dan dapat menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, perlu diberikan perhatian yang lebih pada kesejahteraan dan pengembangan UMKM sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran dimana pemerintah dapat mengambil peran sebagai perumus kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM seperti contohnya memberikan modal maupun pelatihan bagi masyarakat yang ingin membuat usaha. Pemerintah juga dapat memberikan pula dukungan berupa kemudahan perijinan bagi pemilik UMKM dalam mengurus administrasi legalitas usaha mereka pada lembaga yang berwenang seperti SIUP, sertifikat halal, dan sebagainya. Sementara itu terkait peningkatan nilai PDRB, Pemerintah diharapkan dapat memperluas sektor perekonomian dengan merambah ke seluruh sektor baik primer, sekunder, maupun tersier kemudian penting pula untuk mendistribusikan output dari nilai PDRB yang ada secara menyeluruh dan merata. Serta menjalin kerja sama dengan pihak swasta agar bersedia melakukan investasi atau penanaman modal ke daerah yang bersangkutan sehingga peningkatan nilai PDRB dapat tercapai.

Selain saran kepada pihak pemerintah, penulis juga memberikan saran kepada beberapa pihak terkait diantaranya yaitu mendukung setiap program-program yang diadakan oleh pemerintah dan turut serta mengambil peran atau andil dalam mengupayakan kesejahteraan yang akan dirasakan bersama, dan juga memperbarui pola pikir menjadi pola pikir yang berkembang dalam menciptakan karakter pekerja keras, pantang menyerah, dan senantiasa optimis. Selain itu, penting untuk menjadi selektif dalam menghadapi era disrupsi revolusi industri 4.0. Beberapa hal tersebut penting untuk diperhatikan karena penurunan jumlah penduduk miskin atau tingkat kemiskinan memerlukan upaya dari berbagai belah pihak tidak hanya pemerintah saja.

REFERENSI

Alhudhori, M. (2017). Pengaruh Ipm, Pdrb Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 1(1), 113. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v1i1.12>

Bintang, A. B. M., & Woyanti, N. (2018). Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (2011-2015). *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(1), 20–28. <https://doi.org/10.24856/mem.v33i1.563>

Handayani, A. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesehatan Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Bojonegoro tahun 2002 -2015. *Jurnal EKBIS*, 19(1), 1024–1038.

Handayani, H. R., & Priastiwi, D. (2019). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, Dan Pdrb Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah [Universitas Diponegoro]. In *Diponegoro Journal of Economics*. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>

Melati, P. M., & Suryowati, K. (2018). Aplikasi Metode Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect Untuk Menganalisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Statistika Industri Dan Komputasi*, 3(1), 41–51. <http://ipm.bps.go.id/>

Muslim, M. R. (2014). Pengangguran Terbuka Dan Determinannya. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan Volume 15, Nomor 2, 15(2)*, 171–181. <http://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/download/1234/1292>

Permana, A. Y., & Arianti, F. (2012). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009. *Diponegoro Jurnal Of Economics*, 1(1), 2. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/128>

Prasetyani, D., & Sumardi. (2020). *Analisis Produk Domestik Regional Bruto* (Vol. 4, Issue 1). Surakarta : CV. Djiwa Amarta Press.

Setya Ningrum, S. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 184–192.

Tisniwati, B. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 33. <https://doi.org/10.22219/jep.v10i1.3714>

Wirawan, I. M. T., & Arka, S. (2015). Analisis Pengaruh pendidikan, PDRB Per kapita dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(5), 546–560.